

## **PRESPEKTIF ISLAM SOCIAL FINANCE DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

### **PRESPEKTIF ISLAM SOCIAL FINANCE IN POVERTY ALLEVIATION EFFORTS IN INDONESIA**

**Imama Zuchroh**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing, Malang  
Email: [zuchroh1974@gmail.com](mailto:zuchroh1974@gmail.com)

Naskah masuk: 2021-08-03

Naskah diperbaiki: 2021-08-26

Naskah diterima: 2021-08-31

#### **Abstrak**

*Angka kemiskinan dunia terus merangkak naik. Pusaran gelombang terus menggulung Negara-negara yang berdampak pandemic corona. Upaya Indonesia yang dari tahun ke tahun menurunkan angka kemiskinan menjadi sia-sia bahkan progress ataupun pencapaiannya seketika lenyap. Memang kemiskinan dan ketimpangan merupakan fenomena global namun meningkatnya kondisi tersebut merupakan ancaman yang besar. Kemiskinan menunjukkan kurangnya pendapatan dan diperlukan cara-cara untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Islam social Finance telah memainkan peran penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan melalui bantuan kepada masyarakat atau umat. Oleh karena itu, penelitian ini melalui metode study literature mengeksplorasi peran keuangan social Islam tersebut sebagai jalan alternatif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dan hal ini diharapkan akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara.*

*Kata kunci: keuangan social islam, kemiskinan, ekonomi islam*

#### **Abstract**

The world's poverty rate continues to creep up. The vortex of waves continues to roll the countries impacted by the corona pandemic. Indonesia's efforts from year to year to reduce poverty are in vain and even its progress or achievements have instantly vanished. Indeed poverty and inequality are global phenomena but increasing these conditions are a major threat. Poverty shows a lack of income and needed ways to achieve a better standard of living. Islam social Finance has played an important role in helping reduce poverty and inequality through assistance to the community or people. Therefore, this research through the study literature method explores the role of Islamic social finance as an alternative way to reduce poverty and inequality. And this is expected to contribute to the country's economic development.

*Keywords: islamic social finance, poverty, islamic economy*

Copyright © 2021 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, kemiskinan dan ketidaksetaraan masih menjadi jelaga bagi kondisi ekonomi beberapa Negara. Dan di era pandemic seperti saat ini kondisi tersebut tentu akan meningkat. Kemiskinan merupakan kendala utama perbaikan ekonomi dan mata air kondisi tersebut salah satunya adalah masalah kurangnya kesempatan aktifitas ekonomi sehingga bermuara pada tingkat tingkat kemiskinan rumah tangga dan individu. Kurangnya kesempatan ini telah meningkatkan ketimpangan. Para ahli telah mengeksplorasi bahwa untuk memecahkan masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan, diperlukan strategi yang tepat melalui program-program pengentasan kemiskinan sehingga penduduk miskin dapat memperoleh manfaat darinya [1]. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2017 ada sekitar 1,4 miliar penduduk dunia memiliki pendapatan kurang dari UDS 1 per hari. Dari sudut pandang yang lebih luas, sekitar 1,75 miliar orang di 104 negara yang dicakup oleh UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) termasuk dalam MPL (Multidimension Poverty List) atau Daftar Kemiskinan Multidimensi hal ini menunjukkan 1/3 dari populasi mereka hidup dalam kemiskinan multidimensi yang menunjukkan kurangnya pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Kemiskinan mengandung kekurangan gizi, pendidikan, keamanan, kesehatan, martabat dan pemberdayaan.

Penelitian Bank Dunia (WB), penurunan satu persen dalam tingkat pembangunan negara-negara berkembang menjebak tambahan dua puluh juta orang dalam kemiskinan. Oleh karena itu ketika pembangunan ekonomi melambat dapat menyebabkan implikasi buruk pada tingkat kemiskinan [2]. Selama 70 tahun sebelumnya, lembaga Bilateral Donor and United Nations (BDUN) dan Multilateral Development Banks (MDB) telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mendorong pertumbuhan di negara berkembang. Bank Dunia (WB) sendiri telah mendistribusikan lebih dari USD500 miliar untuk mendanai proyek-proyek di negara berkembang. Perjuangan ini tidak diragukan lagi menghasilkan hasil yang substansial dalam hal perluasan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan peningkatan akses terhadap sanitasi, listrik dan air.

Namun bagi Indonesia cukup ironis, Negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, dimana menurut data Bank Dunia, perekonomian Indonesia yang diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebesar USD 1.042 triliun atau setara Rp 14.837 triliun pada 2018. Disusul Thailand dan Filiphina masing-masing, USD 504 milyar, USD 397 milyar. Bahkan dengan Singapore mereka kalah jauh yang hanya USD 364 milyar [3]. Namun dengan posisi perekonomian yang unggul tersebut, angka kemiskinan masih menjadi potret buram di Negara ini. Memang tampak jejak program pemerintah dalam mengentaskan kaum papa tersebut juga menunjukkan keberhasilan menurunkannya. Seperti pada Maret 2019, ada 9,41 persen dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang masih berkubang dalam kemiskinan, meski angka tersebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dimana rakyat yang kurang beruntung masih 9,82 persen pada tahun 2018. Jika kita lacak data kebelakang seperti pada tahun 2013 data angka kemiskinan masih sebesar 28,17 juta. Pada tahun-tahun berikutnya justru merangkak naik yakni pada tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Dan pada tahun selanjutnya yakni 2016 pemerintah mampu menurunkannya menjadi 28,01 juta jiwa. Tren penurunan ini berlanjut pada 2017-2019 yakni terus menurun dari 27,77 juta jiwa, kemudian menjadi 25,95 juta jiwa dan terakhir 25,14 juta.

**Tabel 1. Penduduk Miskin Tahun 2010-2019**

Tahun	Angka Kemiskinan (dalam jutaan)	Angka Kemiskinan (Prosentase)
2010	31,02	13,33
2011	30,12	12,49
2012	29,25	11,96
2013	28,17	11,36
2014	28,28	11,25
2015	28,59	11,22
2016	28,01	10,86
2017	27,77	10,64
2018	25,95	9,82
2019	25,14	9,41

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (data diolah, 2021)

Bagaimanapun juga angka masyarakat yang masih berada di dalam jurang kemiskinan tersebut cukup besar. Hingga jika sandingkan dengan laporan Bank Dunia yang bertajuk "Riding the waves: The East Asian Miracle in the 21st century". Dimana dalam laporan tersebut oleh Bank Dunia kaum tuna sejahtera dari berbagai Negara-negara tersebut dikategorikan menjadi kelompok-kelompok. Setiap negara dihimpun dalam kelompok: miskin ekstrem, miskin moderat, rentan, secure, dan kelas menengah. Hasilnya untuk Indonesia cukup menghadirkan kerisauan. Sebab dibandingkan dengan negara sekawasan ASEAN lainnya, pada tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 7.5%, maka posisi Indonesia hanya lebih baik dari Laos. Sedangkan Cambodia hanya 0.7%. Thailand dan Malaysia sudah mencapai zero extreme poverty. Kemudian, sama seperti kondisi kemiskinan ekstrim, dibandingkan dengan negara ASEAN lain, dengan proporsi miskin moderat sebesar 24.6%, kembali Indonesia hanya lebih baik dari Laos. Dengan demikian, tingkat kemiskinan Indonesia (gabungan antara ekstrim dan moderat) lebih tinggi dibandingkan Cambodia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Malaysia sudah hampir 100%, rakyatnya sejahtera (kategori secure dan kelas menengah), Thailand hampir 90% sejahtera, dan Vietnam – negara yang belum selama Indonesia merdeka – mendekati 70%, hanya 32% rakyat Indonesia masuk ke kategori itu. Ini bahkan lebih kecil dibandingkan bahkan Cambodia (35.6%). Tak bisa dipungkiri, Indonesia jauh tertinggal [4].

Kesejahteraan rakyat yang ditempuh melalui pembangunan ekonomi akan terasa hampar dengan fakta-fakta tersebut diatas. Menurut Nadal El-Gattis dimana kemiskinan, ketidakadilan sosial dan ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, ketidakstabilan ekonomi dan inflasi aset moneter hal-hal tersebut merupakan penyakit pembangunan ekonomi dan semuanya bertentangan dengan sistem nilai Islam [5].

Oleh karena itu, studi ini menyajikan bagaimana keuangan sosial Islam sebagai seperangkat instrumen yang ditawarkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan formula ISF pendekatan yang meliputi Wakaf, Sedekah, dan Zakat. Dapat menguapkan kubangan kemiskinan dan juga mengurangi ketidaksetaraan di antara mereka yang kurang beruntung.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang fokus pada Islamic Social Finance. Secara garis besar kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut mengakui bahwa peran Islamic Social Finance cukup besar. Bahkan ditengah bencana atau pandemic seperti saat ini, sistem keuangan social islam menjadi instrument yang mampu meringankan beban di masyarakat, seperti yang ditulis oleh Iskandar dkk, penelitian yang mereka beri judul "Peran Ekonomi Dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid 19" para peneliti memotret kondisi pandemic yang sedang terjadi dengan system keuangan social yang ada. Dari penelitian tersebut buah kesimpulan yang mereka sajikan antara lain, yakni umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model philanthropy dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 [6].

Selain itu Ahmadan juga turut mengulas keuangan social islam dalam penelitiannya, di tahun 2020 lalu. Penelitian yang diberi tajuk "Keuangan Social Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid 19" Menurutnya dengan memaksimalkan peran dari ISF saat masa pandemic ini maka roda perekonomian kaum bawah dimana pada golongan ini dampak terbesar yang paling dirasakan efek dari serangan wabah yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi. Masih menurut Ahmadan, Dana ZIS diberdayakan untuk penyediaan kebutuhan dasar masyar akat, seperti penyediaan makanan pokok, alat pelindung kesehatan dan kebersihan,dalam kondisi ini. Dana atau aset wakaf dapat disalurkan untuk membantu penyediaan fasilitas sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat dan penyediaan sumber air bersih. Jika memungkinkan dana wakaf bisa juga membantu penyediaan alat-alat kesehatan yang memiliki manfaat yang terus menerus seperti alat bantu nafas, ventilator atau kebutuhan lainnya. Senada dengan Iskandar pada jurnal sebelumnya bahwa peran besar dari keuangan social layak ditampilkan [7].

Kemiskinan ditinjau sebagai jagad yang kompleks dengan menempatkan etika sebagai bantalan kebijakan dan dibingkai sebagai sebuah persoalan vital yang harus ditangani dengan serius, peneliti Suzuki dan rekan-rekannya mengutarakan hal tersebut dalam riset mereka yang diberi judul "Islamic Microfinance And Poverty Allevation Program: Preliminary Research Finding From

Indonesia”, menurut mereka kaum tuna sejahtera pada dasarnya punya kapasitas yang memadai untuk keluar dari kubangan kemiskinan. Program pengembangan masyarakat adalah exit untuk mengentaskan mereka. Dan Keuangan mikro syariah dapat memainkan peran penting dalam memerangi dilema kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Muslim [8]. Oleh karena itu perspektif keuangan social Islam atau Islam Social Finance masih sangat menarik untuk terus dikaji lebih jauh sehingga dana social tersebut tidak hanya dibagikan untuk memadamkan kemiskinan sesaat namun turut menurunkan angka kemiskinan.

### 3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Dimana paparan secara sistematis dan akurat tentang objek yang diteliti, yakni keuangan social Islam dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey buku (book survey), karena sumber-sumber datanya terdiri dari literatur-literatur seperti buku, makalah, artikel dan lain-lain. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data ini sering disebut sebagai studi kepustakaan (Library Research) [9]. Pada riset ini jenis data bersifat kualitatif. Data yang terkumpul di analisis dan digambarkan dengan menggunakan metode deskriptif.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia tentu sangat relevan jika dana social dimanfaatkan dengan maksimal. Memperdayakan keuangan Islam sebagai alat social yakni zakat, wakaf, dan sadaqah, kesemuanya adalah bentuk filantropi tetapi memiliki bentuk dan definisi yang berbeda. Zakat adalah pembayaran pendapatan yang wajib, sedangkan Wakaf mengacu pada pemberian amal sebagai kepercayaan wakaf amal. Selain itu, shadaqah lebih bersifat amal dan sukarela dan berarti memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan, mengembangkan infrastruktur, dan memelihara penyediaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan miskin, meskipun sebagian besar dalam struktur informal [10].

Kajian ini menyoroti bagaimana mengoptimalkan manfaat dana sosial syariah untuk meningkatkan kualitas hidup, tidak hanya dengan menyuntikkan uang atau memberi makan orang miskin tetapi untuk membekali mereka dengan keterampilan bisnis dan dana sosial syariah dapat digunakan untuk menopang dana tersebut. memungkinkan masyarakat miskin untuk menghasilkan pendapatan dengan mengintegrasikan dana dengan kegiatan ekonomi.

Dalam ajaran agama Islam, bahwa tiap-tiap muslim diberi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sebab pemberian zakat ini akan menjadi pembersih hati dan jiwa dan melakukan hal tersebut bermuara untuk mendapatkan berkah, menjalankan kewajiban dan berbagai kebaikan.

Zakat yang dihimpun, dikelola dan didistribusikan dengan baik dan tepat akan mampu memberikan potensi yang cukup besar untuk mendorong turunnya tingkat kemiskinan. Zakat ini berfungsi mendorong seseorang mengeluarkan hartanya untuk dimanfaatkan secara produktif [11]. Berikut data penghimpunan ZIS pada tahun 2010-2019.

**Tabel 2. Penghimpunan Dana BAZNAS**

Tahun	Penghimpunan
2010	1.500.164.240.975
2011	1.728.864.359.398
2012	2.212.398.951.344
2013	2.639.604.069.729
2014	3.300.000.000.000
2015	3.650.369.012.964
2016	5.017.293.126.950
2017	6.224.371.269.471
2018	8.117.597.683.267
2019	10.227.943.806.555

Sumber : BAZNAS (data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 2. Dapat diketahui bahwa pengumpulan dana oleh BAZNAS setiap tahun terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat adalah optimal sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Keberhasilan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari kegiatan

pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi meningkat yang berdampak pada peningkatan pendapatan di masyarakat. Maka, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatannya, itu akan berdampak pada laju penurunan dari keluarga miskin. Tingkat kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh indikator lain, yaitu pengangguran. Di negara berkembang pengurangan pengangguran adalah penting dan prioritas bagi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan di suatu negara. Sesuai dengan teori, jika orang bekerja dan kemudian mendapat penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang miskinnya.

Chapra mengatakan dalam *Islamic Economic Thought and the New Global Economy*, 2001, bahwa penting untuk diingat bahwa jika tujuan keuangan Islam adalah untuk mendapatkan pembangunan bagi masyarakat secara keseluruhan, fokusnya harus melampaui variabel ekonomi karena pembangunan terkait dengan tujuan sosial, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesempatan untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Sistem perwakafan di Indonesia telah didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penerapan Paradigma Baru Tentang Wakaf; ada penekanan pada pemberdayaan wakaf yang secara produktif memberikan manfaat sosial (kesejahteraan bagi masyarakat). Temuan Obaidullah dan Khan yang tertuang dalam penelitian mereka menemukan bahwa masyarakat miskin membutuhkan instrumen, alat khusus untuk mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ketersediaan lembaga keuangan yang nyaman dan murah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dan ini sejalan dengan penelitian dari Institute of Education, University of London yang berjudul, Dalam situasi seperti itu, inklusi keuangan untuk setiap lapisan masyarakat harus menjadi tujuan utama, dan itu harus menjadi tujuan lembaga keuangan. Selain itu, perlu juga diingat bahwa bank syariah memiliki tujuan sosial ekonomi yang dituangkan dalam *Maqashid Al-Syariah* [12],

Kemiskinan dan ketimpangan dapat dikurangi dengan menggunakan instrumen dana social Islam dan pendekatan distributif seperti Wakaf, Sadaqah, dan Zakat. Sasarannya adalah

orang-orang miskin di masyarakat. Menurut Muazir dan Musari (2016) sistem keuangan Islam adalah pendekatan baru di mana tanggung jawab adalah untuk melaksanakan keadilan distributif melalui distribusi kekayaan. Hal ini akan mengarah pada pengentasan kemiskinan dan mengurangi masalah ketimpangan di masyarakat [13].

Ackerman dan Frank (1998) mendesak agar ketimpangan kesejahteraan harus diatasi dengan sirkulasi kekayaan. Lebih-lebih lagi, tujuan utama keuangan Islam adalah untuk mencapai sistem ekonomi moral yang seharusnya memiliki efek jangka panjang pada kekayaan sementara pengangguran, ketidaksetaraan dan kemiskinan berkurang [14].

Lebih dari itu, Musari (2016) mengklaim bahwa minimalisasi ketimpangan distributif dapat dicapai dengan sistem pendidikan dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan yang sama di antara warga negara. Wakaf, sedekah dan zakat dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakat miskin. Hassan (2010) menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam dapat memecahkan masalah kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat melalui zakat dan wakaf. Karena pembiayaan Islam mempromosikan kesetaraan, keadilan sosial dan melarang bunga, mungkin akan menghasilkan manfaat yang lebih baik jika terstruktur dengan tepat [15].

Maka peran dari keuangan social Islam atau Islamic Social Finance akan mempunyai efek panjang ketika dana yang terkumpul tidak hanya diberikan sebagai santunan sesaat. Lembaga keuangan dapat menjadi ujung tombak dengan memberikan kredit melalui mekanisme syariah. Agar keinginan masyarakat yang ingin berniaga namun terkendala permodalan dan ketika mengajukan pada perbankan terganjal agunan dapat diatasi. Selain itu perniagaan sektor pertanian juga tidak kalah penting mendapat perhatian pendanaan, karena sektor ini akan mampu menampung angkatan kerja yang kena dampak pemutusan hubungan kerja ataupun kehilangan pekerjaan. Pemerintah di semua tingkatan dapat mendorong petani dengan melibatkan mereka. Selain meningkatkan produktivitas, ini juga akan memastikan pasar mendapatkan produk pertanian dengan harga yang wajar.

#### **Peran Islamic Social Finance Secara Global**

Untuk harapan terhadap Islamic Social Finance berdasarkan uraian diatas tampak layak

disematkan. Bahkan jika berbicara secara global, telah banyak negara-negara muslim yang berperan dengan kekuatan Islamic socialnya. Hingga kekuatan terhadap Islamic Social ini telah menjadi isu global. Bank Dunia pun sadar akan hal ini, terbukti pada 2018 lalu di Kuala Lumpur dilaksanakan forum pertemuan antara Islamic Development Bank dengan Bank Dunia. Simposium selama dua hari tersebut membahas mengenai Islamic Social Finance yang dianggap selaras dengan SDGs (Sustainable Development Goals) program Bank Dunia guna mengatasi kemiskinan, kelaparan serta kesetaraan peran wanita [16].

Memang Islamic Development Bank merupakan lembaga donor untuk pendanaan syariah di dunia atau tepatnya untuk negara-negara anggotanya. Namun selain itu peran lembaga ini juga sangat konsen terhadap persoalan sosial, kemanusiaan dan ekonomi. Bila melacak kebelakangan lembaga ini didirikan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tujuannya sebagai sarana pada anggotanya terhadap akses keuangan syariah. Niatan serta komitmen ini di bahas pertama kali pada Konfrensi Menteri Keuangan Negara Islam yang Kedua, yang diadakan di kota Jeddah pada tahun 1974 [17].

Perkembangan Islamic development bank pada tahun-tahun berikutnya lebih beragam, bantuan terhadap proyek-proyek untuk sektor publik dimana berimbas peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan lebih banyak dilakukan. Tabel berikut menyajikan bantuan dari IDB melalui Islamic Social Finance. Menyentuh hal-hal mendasar dengan program pengentasan kemiskinan di berbagai negara. Dana yang disalurkan dari rata-rata pertahun terus meningkat.

**Tabel 3. Pendanaan Islamic Development Bank dari 2010-2019 (dalam USD Milyar)**



Sumber: Development Effectiveness Report, 2019

Dari tabel diatas tampak bahwa pendanaan dari Islamic Bank Development untuk kemanusiaan selama kurun satu dasa warsa terus merangkak naik. Jika pada tahun 2010 mengelontorkan USD 2.078 milyar, 5 tahun berikutnya ada kenaikan mencapai 15% menjadi USD 2342 milyar. Angka inipun terus merayap naik. Kenaikan cukup signifikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut. Masing masing USD 2.500 milyar, USD 2.614 milyar dan USD 2.981 milyar [18].

Potensi tersebut yang dibaca oleh Bank Dunia bahwa pendanaan dalam Islamic Social Finance cukup besar pada program-program kemanusiaan. Dalam laporan tahun sebelumnya program-program yang dibiayai turut disajikan. Pada 2018 total 71 proyek dibiayai dan 272 operasi hibah selesai pada tahun tersebut. Kontribusi IDB dalam proyek-proyek ini sekitar USD 6,5 miliar yang meliputi beberapa negara. Sektor energi menyumbang 31% dari persetujuan diikuti oleh transportasi (19%), kesehatan dan pertanian (masing-masing 13%) dan air, sanitasi dan layanan perkotaan (masing-masing 9%) [19].

Data yang disajikan dalam Islamic Social Finance Report (ISFR) 2020 bahwa sektor keuangan sosial Islam, yang terdiri dari zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam, memiliki potensi besar yang sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Secara tersurat menyatakan bahwa potensi zakat secara global cukup tinggi, nilainya lebih dari USD 600 milyar / tahun. Bahkan menurut laporan tersebut yang diterbitkan oleh IRTI (Islamic Research And Training Institute), nilai zakat secara global akan terus naik. Sebab berdasarkan analisa mereka, beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Maroko, Tunisia, Libya, dan Aljazair. Penerimaan dari zakat dari tahun ke tahun terus meningkat. Beberapa negara tersebut diteliti persentasi penerimaan zakat berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Seperi Maroko jika pada tahun 2013 persentasi penerimaan zakat dibanding PDB mencapai 4,19% dibanding PDB, sedangkan Aljazair pada tahun sudah mencapai 4,9 % dibanding PDB [20].

Kekuatan keuangan sosial Islam tampak begitu besar dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun' Maka sebuah keniscayaan jika daya dari Islamic Social finance akan menjadi harapan dalam mengentaskan kemiskinan dan bermuara pada mensejahterahkan umat. Memang beberapa kajian seolah menjadi kritik tentang peran lembaga-lembaga Islam dalam program-

program kemanusiaan. Dalam Pericoli (2020) salah satunya menyatakan masih adanya seleksi terhadap negara yang mendapat bantuan dari lembaga donor dalam hal ini Islamic Development Bank artinya skala prioritas bukan menjadi unsur yang utama dari bantuan yang diulurkan [21]. Atau dalam Hernandez (2017) "Politik Keagamaan" mewarnai motivasi dari sang peminjam. Dalam kajian ini menemukan bukan berdasarkan muslim atau non muslim, namun perbedaan aliran Sunni dan Syiah banyak mewarnai keputusan dari hibah atau bantuan dari Islamic Development Bank, dimana negara Saudi Arabia menjadi pendonor utama [22]. Namun dalam kajian ini berasumsi meyakini bahwa keuangan sosial Islam punya kemampuan besar dalam mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan.

## 5. SIMPULAN

Kejayaan filantropi Islam sudah lama dibuktikan, ketika khalifah Umar Abdul Aziz adalah fakta betapa peran keuangan sosial Islam telah memberikan manfaat yang cukup besar. Potensi tersebut kini dapat dikembangkan, hal ini terlihat dari data penerimaan Keuangan Sosial Islam oleh BAZNAS. Jumlah penerimaan dari zakat, infaq, shadaqah terus meningkat. Namun, ada kesenjangan antara distribusi untuk konsumsi, keuangan sosial dapat memainkan peran panjang dan distribusi untuk hal-hal atau produksi yang lebih bermanfaat. Kontribusi utama dari studi ini tetap dalam perspektif Islam terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Kesimpulannya, konsep keuangan sosial Islam tumbuh dengan kemampuan yang signifikan, sebagai agen terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Berdasarkan literatur sebelumnya, ada indikasi kuat bahwa lembaga amal seperti (Zakat, Wakaf, Sadaqat) dapat menjadi alternatif yang mungkin untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan jika dilaksanakan dengan baik. Studi ini telah mengkonfirmasi bahwa Zakat, Wakaf dan Sadaqah adalah instrumen penting untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Y. M. Solikatun, "Kemiskinan Dalam Pembangunan," *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 3, no. 1, pp. 70-90, 2014.
- [2] ASIAN DEVELOPMENT BANK, "www.adb.org," Asian Development Bank, 21 04 2021. [Online]. Available: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/692111/ado2021.pdf>. [Accessed 02 08 2021].
- [3] V. b. Kusnandar, "www.databoks.katadata.co.id," 26 09 2019. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/ekonomi-indonesia-terbesar-di-kawasan-asean>. [Accessed 03 08 2021].
- [4] A. A. Yusuf, *Keadilan Untuk Pertumbuhan*, Bandung: UNPAD Press, 2018.
- [5] N. El-Ghattis, *Islamic Banking 's Role in Economic Development : Future Outlook*, vol. 1, Bahrain: Bahrain Institute Of Banking, 2011, pp. 1-23.
- [6] A. Iskandar, B. T. Possumah and K. Akbar, "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-*, vol. 7, no. 7, pp. 625-638, 2020.
- [7] D. Ahmadan, "KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MENGHADAPI," *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 2-15, 2020.
- [8] S. Yasushi, S. Pramono and R. Rufidah, "Islamic Microfinance And Poverty Allevation Program: Prelemanary Research Finding From Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, vol. 05, no. 01, pp. 63-81, 2016.
- [9] C. H. Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

- [10] J. Tahiri, "An Integrated Approach for Building Sustainable Islamix Social Finance Ecosystem," *ISRA: International Journal Of Islam Finance*, vol. 02, no. 11, pp. 246-266, 2019.
- [11] A. S. Widiastuti and K. Kosasih, "Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 64-80, 2021.
- [12] H. Ahmed, "The Islamization of Economies and Knowledge: A New Institutional Economics Perspective. 29 (4), 1-27.p," *American Journal of Islamic Social Sciences.*, vol. 29, no. 4, pp. 1-27, 2012.
- [13] Muazir and K. Musari, "Institutional Arrangement for Distributive Justice of Islamic Financial Institutions Based on New Institutional Economics in Indonesia.," in *Muazir & Musari, K., (2016). Institutional Arrangement for Distributive Justice of Islamic Financial Institutions Based on New 1st IJISEF International Journal of Islamic Economics and Finance*, Yogyakarta, 2016.
- [14] Ackerman and Frank, *The Political Economy of Inequality*, Wahinton DC: Island Press, 1998.
- [15] M. K, "Economic Sustainability for Islamic Nanofinance Through Waqf- Sukuk Linkage Program (Case Study in Indonesia).," *Musari, K. (2016). Economic Sustainability for Islamic Nanofi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi*, vol. 02, no. 04, pp. 73-94, 2016.
- [16] R. Syawal, "sharianews.com," 13 12 2018. [Online]. Available: <https://sharianews.com/posts/islamic-social-finance-sudah-menjadi-isu-global>. [Accessed 27 08 2021].
- [17] I. Warde, *Islamic Finance Inte Global Economy*, Edinburg: Edinburg University Press, 2000.
- [18] I. D. Bank, "Development Effectiveness Report," ISDB, Jeddah, 2019.
- [19] I. D. Bank, "Development Effectiveness Report," ISDB, Jeddah, 2018.
- [20] I. R. A. T. Institute, "Islamic Social Finance Report," IRTI, Jeddah, 2020.
- [21] A. Pericoli, "Islamic finance and charity in the Muslim world. The role of the Islamic Development Bank in financing aid," *Journal of Economics and Business Aseanomics*, vol. 5, no. (2), pp. 113-133, 2020.
- [22] V. K. Hernandez D., "Politics of Religiously Motivated Lending: An Empirical Analysis of Aid Allocation by the Islamic Development Bank," *Journal of Comparative Economics*, pp. 910-929, 2017.